

ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR SUPRA ARTAPERSADA CABANG SUKABUMI

Ade Sudarma

Manajemen Retail, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
korespondensi: adesudarma@ummi.ac.id

ABSTRACT

The public's access to loan services is a top priority for People's Credit Bank. Credit risk, specifically the appearance of non-performing loans, will be present along with the distribution. The purpose of this study is to ascertain how non-performing loans are handled at the PT. BPR Supra Sukabumi Branch. Utilizing in-depth interviews, observation techniques, and documentation, the research method is qualitative. According to the study's findings, the distribution of working capital will decline by 6.05% in 2022, while NPL will rise by 1.37%. The PT. BPR Supra Artapersada Sukabumi Branch employs a number of strategies to handle non-performing loans, including intensive visits to debtors, warning letters 1-3, 3R efforts (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring), taking control of collateral, and writing off debtors' books.

Keywords: BPR, Non-performing Loans, Handling Non-Performing Loans

ABSTRAK

Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan yang mengutamakan layanan pemberian kredit kepada masyarakat. Dalam penyalurannya akan diiringi dengan risiko kredit yaitu timbulnya kredit bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait penanganan kredit bermasalah pada PT.BPR Supra Cabang Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan melakukan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian adanya peningkatan NPL pada tahun 2022 sebesar 1,37%, sedangkan dalam penyaluran modal kerjanya menurun sebesar 6.05%. Dalam hal penanganan kredit bermasalah PT.BPR Supra Artapersada Cabang Sukabumi menerapkan beberapa upaya yaitu dengan melakukan kunjungan intensif kepada debitur, memberikan surat peringatan 1-3, melakukan upaya 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*), pengambilalihan agunan dan hapus buku bagi debitur.

Kata Kunci: BPR, Kredit Bermasalah, Penanganan Kredit Bermasalah

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan perbankan memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam hal pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi. Perbankan dalam hal ini memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian di dunia modern saat ini karena hampir semua sektor keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bagi pihak yang kekurangan dana dapat melakukan

pinjaman ke bank untuk membayar memenuhi kegiatan usaha dan kegiatan rumah tangga. Melalui fungsi intermediasi, institusi perbankan mempunyai kemampuan untuk merealokasikan dana secara lebih efektif diantara dua pihak (*surplus and deficit units*) yang terpisah dan tidak saling mengenal satu sama lainnya (1). Berdasarkan hal itu, tugas pokok dari lembaga perbankan selain menghimpun dana, bank juga mengalokasikan dana dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan kredit yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kredit merupakan uang atau barang yang diberikan kepada orang lain pada waktu tertentu dengan atau tanpa jaminan, bersama dengan pembayaran bunga atau tanpa bunga (2). Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan perbankan. Oleh karena itu, pendapatan bank baru akan diterima apabila harga jual kredit lebih tinggi daripada biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh bank (3). Dalam hal ini, bank yang lebih mengutamakan layanan pemberian kredit adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 menyatakan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional, kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri yaitu menyediakan produk jasa yang baik yakni dalam hal pemberian kredit kepada masyarakat.

PT. BPR Supra Artapersada atau dikenal dengan BPR Supra merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki berbagai macam produk pinjaman yang dapat menarik minat masyarakat untuk mengajukan permohonan kredit. Berdasarkan segi penggunaannya serta berbagai unsur ekonominya, jenis kredit di BPR Supra terdiri dari Kredit Modal Kerja (KMK) Kredit Konsumtif Lainnya (KKL) dan Kredit Investasi (KI). Bagi BPR kegiatan pemberian kredit kepada debitur merupakan sumber pendapatan yang terbesar maka dari itu, dalam pemberian kredit perbankan perlu mengelola sistem pemberian kredit agar mencapai hasil yang maksimum dan tepat sasaran agar dapat

meminimalkan resiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Risiko kredit muncul ketika debitur dan kreditur bertindak ceroboh dalam memutuskan persyaratan kredit. Maka dari itu, diperlukan adanya prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan analisis 5C yaitu penilaian watak (*Character*), penilaian kemampuan (*Capacity*), penilaian modal (*Capital*), penilaian agunan (*Collateral*) dan penilaian prospek usaha debitur (*Condition of Economy*). Dengan penerapan prinsip ini diharapkan dapat meminimalisir adanya kredit bermasalah. Tujuan pihak bank dalam menganalisis kebenaran mengenai calon debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank dengan segera atau tepat waktu, baik pembayaran angsuran maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan dalam perjanjian yang telah ditetapkan (4).

Dalam proses penyalurannya pihak perbankan perlu memperkirakan risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang, karena tidak jarang ketika proses kredit berlangsung debitur memiliki hambatan-hambatan dalam melakukan kewajiban pembayarannya salah satunya adalah adanya debitur yang tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran, menurunnya omset usaha debitur, adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada debitur, adanya bencana alam dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut dibiarkan, kualitas kredit debitur tersebut akan terus menurun menjadi kualitas kredit bermasalah. Kredit bermasalah mencerminkan kemungkinan terjadinya gagal

bayar akibat adanya ketidak mamuan nasabah dalam membayar angsurannya.

Penelitian yang menyatakan bahwa pemberian kredit sudah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh perbankan dan OJK (5) dan (6). Sedangkan penelitian yang menyatakan bahwa timbulnya kredit macet karena kurangnya pengawasan karakter nasabah, hilangnya jaminan, serta kurangnya kesadaran nasabah yang mengulur waktu dalam pembayaran tagihan kredit, sehingga diperlukan penanganan khusus (7). Hasil penelitian yang menyatakan penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali serta pengambilalihan agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit (8). Sedangkan strategi bank untuk mengurangi kredit macet dengan melakukan operasionalisasi departemen melibatkan pembentukan departemen, melibatkan penilaian kelayakan peminjam, penilaian kembali agunan, pemilihan ukuran yang dapat diterima untuk penyelesaian (pengurangan) kredit bermasalah (9). Berdasarkan pada kajian terdahulu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanganan kredit bermasalah yang diterapkan oleh PT BPR Supra Cabang Sukabumi.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh informasi untuk memenuhi tujuan dan kegunaan tertentu (10). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berdasarkan pada makna realitas sosial yang terjadi atau yang tampak, bukan dari penyebab realitas itu dapat terjadi. Penelitian kualitatif ini memiliki penjelasan mendalam tentang suatu fenomena dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang akan menghasilkan gambaran atau kata-kata tertulis mengenai sebuah proses atau fenomena dari orang-orang serta perilaku yang diamati (11). Adapun objek penelitian ini adalah penanganan kredit bermasalah pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Sukabumi. Metode penelitian kualitatif mengandalkan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok dengan latar alamiah (12).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya (13). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer yaitu data diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam kegiatan yang tengah diteliti, dan data sekunder yaitu data diperoleh dari berbagai literatur.

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan yang diperoleh langsung ditempat kejadian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipatif, dimana dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diamati ataupun digunakan sebagai sumber data dari penelitian. Pada kegiatan observasi ini, peneliti melakukan observasi pada hari-hari tertentu tergantung dari kondisi yang ada pada subjek penelitiannya (14).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara narasumber atau informan dan pewawancara atau peneliti untuk mengumpulkan informasi berupa data. Dalam hal ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas tetapi masih dalam lingkup wawancara secara keseluruhan. Dalam wawancara semi-terstruktur dapat memungkinkan adanya pertanyaan baru yang muncul, yang disesuaikan dengan jawaban yang diberikan oleh informan, sehingga diharapkan informasi yang didapat akan lebih mendalam. Pihak yang terlibat dalam proses wawancara ini adalah staf penagihan dan koordinator penagihan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa buku, dokumen angka ataupun gambar. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data yang dapat mendukung hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif, analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi (10). Dalam menganalisis data penulis akan melakukan beberapa tahapan diantaranya:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada tahap ini penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan *key informant* atau seseorang yang benar-benar mengetahui mengenai situasi objek penelitian serta mencatat dan merekam hasil wawancara dengan pihak terkait.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap ini akan dilakukan reduksi data yaitu dengan cara penulis mencatat atau memilih hal-hal pokok serta memfokuskan hasil-hasil penting dari wawancara dan membuang hasil yang tidak relevan dengan topik penelitian dibantu alat perekam elektronik.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data selanjutnya penulis akan melakukan penyajian data. Dalam hal ini akan disajikan dalam bentuk teks yang

bersifat naratif, berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) atau *chart Miles and Huberman* dalam (10). Dengan melakukan *display* data akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dengan menampilkan data.

4. *Concluding Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa gambaran atau deskripsi dari suatu objek yang belum jelas dan ketika diteliti menjadi jelas. Yang ditemukan oleh penulis di lapangan dapat berupa hubungan kausal, interaktif, hipotesis atau teori (10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT.BPR Supra Artapersada atau yang dikenal dengan BPR Supra merupakan salah satu jenis bank perkreditan yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. PT.BPR Supra berdiri berdasarkan akta pendirian tanggal 25 Juni 1992 akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 26 Oktober 1992. Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-37/D.03/2018 tanggal 5 Maret 2018 berdirinya PT.BPR Supra Artapersada merupakan hasil dari merger dengan PT BPR Supra Wahana Arta. PT. BPR Supra Artapersada memiliki fungsi pokok yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memfokuskan usaha pada layanan kredit mikro atau yang lebih dikenal masyarakat dengan perbankan yang memiliki layanan Kredit Cepat Satu Jam Cair.

Kelangsungan kegiatan perbankan dalam mendapatkan keuntungan sangat bergantung pada produk dan layanan yang diberikan. Dalam hal ini, yang menjadi sumber utama pendapatan PT.BPR Supra adalah melalui pemberian kredit. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu (15). Penyaluran kredit oleh BPR Supra menurut sektor ekonominya serta kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Per April Tahun 2023

No	Sektor Ekonomi	Jumlah Debitur	Total Kredit
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	142	Rp 1.101.062.906
2	Perikanan	1	Rp 32.005.625
3	Pertambangan dan Penggalian	2	Rp 89.027.778
4	Listrik, Gas dan Air	1	Rp 54.185.417
5	Konstruksi	2	Rp 173.562.500
6	Perdagangan Besar dan Eceran	528	Rp 4.967.421.796
7	Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	6	Rp 65.593.545

Sumber: PT.BPR Supra Cabang Sukabumi data yang sudah diolah, 2023

Tabel 2. Jumlah Penyaluran Kredit dan Jumlah Kredit Bermasalah Pada Tahun 2021-2022

Tahun	Kredit yang dicairkan	Kredit Bermasalah	Persentase Kredit Bermasalah
2021	11.263.666.874	535.585.039	4,75 %
2022	10.581.782.325	647.249.342	6,12%

Sumber: PT.BPR Supra Cabang Sukabumi data yang sudah diolah, 2023

Tabel 2 menjelaskan bahwa jumlah penyaluran kredit pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 681.884.549 atau 6,05% dari tahun 2021. Sedangkan jumlah kredit bermasalah mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 1,37% dari tahun 2021. Meningkatnya jumlah kredit bermasalah tersebut juga telah melebihi batas maksimum NPL (*NonPerforming Loans*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Dalam hal ini, meskipun pihak bank telah menerapkan prinsip analisis kelayakan pemberian kredit kepada nasabah, kredit bermasalah masih tetap ada. Maka dari itu, diperlukan penanganan yang serius dalam mengatasi hal tersebut agar tidak berdampak pada menurunnya laba operasional perbankan. Kredit bermasalah di BPR Supra Cabang Sukabumi ditetapkan dalam 3 kategori yaitu diragukan, kurang lancar dan macet. Apabila risiko tersebut tidak dapat ditangani dengan baik, maka akan mengancam kegiatan operasional perbankan yang akan menimbulkan kerugian dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan di lapangan, upaya dalam hal penanganan kredit bermasalah yang diterapkan oleh BPR Supra Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Kunjungan Intensif

Pada saat mengunjungi debitur ini pendekatan yang harus dilakukan oleh staf penagihan adalah dengan melakukan pendekatan persuasif, yakni pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan dengan membujuk dan mengingatkan kembali terkait pembayaran angsuran debitur. Adapun upaya melakukan kunjungan kepada debitur ini dapat dilakukan minimal 15 hari terhitung sejak jatuh tempo angsuran.
2. Memberikan Surat Peringatan 1 sampai 3

Surat peringatan ini merupakan hal ideal bagi perbankan yang digunakan sebagai bagian dari perjanjian kredit, serta dalam pemberian surat peringatan ini dilakukan secara bertahap. Adapun Surat Peringatan ini diberikan kedalam 3 tahap diantaranya:

 - a. Surat Peringatan 1 (SP 1)

Surat peringatan 1 dikeluarkan apabila debitur terlambat melakukan pembayaran kewajibannya terhitung dari 60 hari setelah jatuh tempo.
 - b. Surat Peringatan 2 (SP2)

Surat peringatan 2 ini dikeluarkan sebagai lanjutan dari SP1. Dalam

SP2 ini pihak bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak mampu membayar kewajibannya berisi serta debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar maka diterbitkan lah surat peringatan 2 ini.

Surat peringatan yang ke 2 ini diberikan apabila dalam jangka waktu 30 hari debitur belum membayar angsurannya setelah SP1 diberikan.

c. Surat Peringatan 3 (SP3)

Surat peringatan yang ketiga dan terakhir ini dibuat ketika status debitur sudah masuk kedalam kolektibilitas macet. SP3 ini diberikan apabila dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pemberian SP2, melalui surat peringatan 3 ini akan menghantarkan pihak bank untuk menyita jaminan yang dimiliki oleh debitur.

3. Menerapkan 3R

a. Restrukturisasi

Upaya restrukturisasi ini biasanya diterapkan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar pokok dan bunga pinjaman. Restrukturisasi ini hanya dapat diterapkan kepada kolektibilitas yang belum dianggap terlalu bermasalah atau minimal DPK. Salah satu penerapan restrukturisasi yang diterapkan oleh BPR Supra adalah dengan adanya

pengurangan denda. Adapun mekanisme terkait restrukturisasi ini harus melalui surat permohonan restruk yang diajukan oleh debitur.

b. *Rescheduling*

Rescheduling atau penjadwalan kembali ini biasanya dilakukan sesuai dengan kondisi nasabah dengan mengubah jadwal pembayaran atau jadwal angsuran dan hal itu tergantung pada kesepakatan dan kebijakan pihak bank. Hal ini dapat dikombinasikan dengan metode *reconditioning*.

c. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan kembali yang diterapkan dalam menangani kredit bermasalah yang disesuaikan dengan kondisi debitur. Apabila terlambatnya pembayaran angsuran diakibatkan adanya kekurangan modal usaha yang berpengaruh terhadap produktivitas usaha, debitur dapat mengajukan permohonan dana tambahan sehingga dapat mengubah jadwal pembayaran angsuran yang sebelumnya telah ditetapkan.

4. Pengambilalihan Agunan

Berdasarkan perjanjian kredit, agunan akan diambil alih apabila debitur sudah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari berturut-turut atau sudah masuk dalam kolektibilitas macet. Adapun pengambilalihan agunan debitur di BPR Supra ini dikenal dengan istilah "Dititip" di kantor hingga debitur

mampu melunasi pinjamannya, serta jangka waktu kendaraan dititip di kantor adalah selama 1 bulan. Apabila selama dalam waktu 1 bulan setelah dikonfirmasi ke debitur, tidak ada itikad baik untuk membayar atau melunasi pinjaman maka jaminan tersebut akan masuk pelelangan. Akan tetapi, jika melihat kondisi di lapangan tidak semua debitur yang masuk dalam status macet itu harus menyerahkan agunan yang dijaminkan. Karena pihak bank memiliki beberapa pertimbangan mengenai hal itu, diantaranya:

- a. Pihak bank masih menunggu itikad baik dari debitur untuk membayar atau melunasi kewajibannya dengan terus melakukan pendekatan.
 - b. Jaminan yang digunakan merupakan sumber penghasilan debitur.
 - c. Jaminan sudah dipindah tangankan tanpa sepengetahuan bank.
 - d. Terbatasnya ruang penyimpanan jaminan.
5. Hapus Buku

Metode hapus buku ini diterapkan apabila kredit sudah dalam kategori benar-benar macet dan tidak dapat tertagih. Hapus buku juga dapat diterapkan apabila debitur telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris untuk bertanggungjawab atas penyelesaian kreditnya. Upaya hapus buku ini dilakukan BPR untuk memperoleh kembali aset produktif

yang diberikan. Dalam proses hapus buku BPR wajib menerapkan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Aset Produktif. Menurut Peraturan Jasa Keuangan Nomor 33/pojk.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (16). Adapun kategori PPAP umum adalah untuk kategori aset produktif yang memiliki kualitas lancar dan untuk besarnya adalah sebesar 0,5%. Sedangkan untuk kategori dalam perhatian khusus, diragukan, kurang lancar dan macet termasuk kedalam PPAP khusus. Adapun untuk besaran nilai PPAP Dalam Perhatian Khusus adalah sebesar 3%, untuk kualitas kurang lancar adalah sebesar 10%, untuk kategori diragukan adalah sebesar 50%, dan untuk kategori macet adalah sebesar 100% setelah dikurangi dengan nilai agunan. Dalam metode hapus buku ini BPR Supra melakukan pencadangan untuk setiap kolektibilitas dari besarnya laba operasional setiap akhir bulan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara di PT. BPR Supra Cabang Sukabumi terkait penanganan kredit bermasalah yang diterapkan oleh perusahaan sudah baik dan terstruktur. Di mana Perusahaan

memiliki strategi dalam penanganan kredit bermasalah yaitu melakukan kunjungan intensif, memberikan surat peringatan 1 sampai dengan 3, menerapkan 3R (*restructuring, reconditioning, dan rescheduling*), pengambilalihan agunan, dan hapus buku. Selain itu, dalam proses penanganan kredit bermasalah sebaiknya pihak perbankan melakukan upaya pengembangan dan perbaikan dari strategi yang sebelumnya telah ditetapkan, dengan terus meningkatkan pengawasan kepada debitur sehingga timbulnya kredit bermasalah dapat diantisipasi sedini mungkin. Diharapkan hasil riset ini dapat dijadikan acuan bagi PT. BPR Supra Cabang Sukabumi, dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terkait penanganan kredit bermasalah. Serta saran untuk penelitian kedepannya agar dapat menambah bahasan terkait strategi menurunkan NPL dengan mengurangi kredit bermasalah, memperluas objek penelitian dengan melibatkan banyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta menambahkan metode penelitian kuantitatif agar hasil dapat tergambar dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Simatupang Hb. Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jram (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*. 2019;6(2):136–46.
2. Ardela F. *Finansialku.Com*. 2020. Kredit: Pengertian, Jenis, Hingga Prinsipnya. Available From: <https://www.Finansialku.Com/Definisi-Kredit/>
3. Prof Nasir, Mohamad ., Ph.D. A K. Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan. In: Ojk. 2019. P. 79.
4. Pada P, Bpr Pt, Negeri T, Pekanbaru M, Putra S, Rahayu Ni. Prosedur Pemberian Kredit Dan Penanganan Kredit Macet Di Era. 2021;1(1):261–9.
5. Wulandari R, Mahadewi KJ, Keuangan L, Bank Kn, Sondakh M. Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt . Bpr Padma Kantor Pusat Utama Akan Memperlambat Perkembangan Perusahaan Itu Sendiri . *Modal Kerja*. 2022;5:2801–11.
6. Made N, Yasa U, Yuniarta Ga. Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Lpd Desa Pakraman Keramas. 2022;12(3):754–62.
7. Sagita D, Styaningrum F, Kredit P, Macet K. Mengurangi Kredit Macet Pada Pd. 2020;1(1).
8. Maulida Bt, Handayani A. Analisis Penanganan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Pada Perumda Bpr Bank Gresik. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi* 2022;
9. Nikolaieva A, Ekonomi Ki. *Економічний Форум* 4 / 2022. 2023;208–14.
10. Sugiyono Profd. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. 2017.
11. Sendari Ayu A. Liputan 6. 2019 [Cited 2023 Mar 20]. Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah. Available From: <https://www.Liputan6.Com/Hot/Read/4032771/Mengenal-Jenis-Penelitian-Deskriptif-Kualitatif-Pada-Sebuah-Tulisan-Ilmiah>
12. Sirajuddin Saleh. Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. Analisis Data Kualitatif. 2017;180.

13. Salmaa. Deepublish. 2023 [Cited 2023 Mar 21]. Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, Dan Contoh. Available From: <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>
14. Rijali A. Analisis Data Kualitatif. Vol. 17, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah. 2019. 81 P.
15. Ariani Nk, Artaningrum Rg. Analisis Sistem Dalam Efektivitas Pemberian Kredit Pada Pt . Bpr Mitra Bali Mandiri. 2022;5:133–8.
16. Otoritas Jasa Keuangan. Pojk Nomor 33/Pojk.03/2018. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/Pojk03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. 2018;1–68.